

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda

Wahyunengsi T¹✉, Dwi Risma Deviyanti², Ferry Diyanti³

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

¹Email: chichyw5@gmail.com

²Email: dwi.risma.deviyanti@feb.unmul.ac.id

³Email: ferry.diyanti@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana faktor yang mempengaruhinya adalah kompetensi Sumber Daya Manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Samarinda. Responden dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), kepala bagian keuangan/accounting, dan bendahara pada SKPD pemerintah Kota Samarinda. Dari 105 kuesioner yang dibagikan, diperoleh 78 responden yang dapat dimasukkan dalam pengolahan data. Analisis data menggunakan program SPSS versi 21. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Samarinda.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan; Kompetensi Sumber Daya Manusia; Pemanfaatan Teknologi Informasi; Sistem Pengendalian Intern Akuntansi

The Influence of Human Resource Competence, Information Technology Utilization, and Internal Accounting Control System on the Quality of Financial Statements of the Samarinda City Regional Government

Abstract

This study aim to determine the factors that affect the quality of local government financial statements, where the influencing factor is the competence of the Human Resources, utilization of information technology and internal control system of accounting. The population in this study is the Employee accounting / financial administration on regional work units (SKPD) in Samarinda. Respondents in this study is the Financial Administration Officer (CO), head of finance / accounting, and treasurer at government SKPD Samarinda. Of the 105 questionnaires distributed, obtained 78 respondents can be included in data processing. Data analysis using SPSS version 21. The statistical method used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis. Hypothesis testing results show that the competence of human resources, utilization of information technology and accounting internal control systems significant effect on the quality of local government financial statements Samarinda.

Keywords: *Quality of Financial Reports; Competence of Human Resources; Information Technology Utilization Accounting; Internal Control Systems.*

Pendahuluan

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain:

Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah kota di Samarinda pada tahun 2012, 2013 dan 2014 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim. BPK RI Perwakilan Kaltim masih menemukan beberapa kelemahan pada sistem pengendalian penganggaran keuangan, pengelolaan aset yang dianggap banyak yang belum terselesaikan, temuan kerja sama pasar dengan pemerintah kota Samarinda dianggap tidak sesuai dengan perjanjian, laporan keuangan belum disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah masih belum memadai.

Namun, untuk tahun anggaran 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah melakukan audit hasil pengelolaan keuangan Pemerintah kota Samarinda. Tetapi BPK menilai, jatuhnya opini WTP tetap menjadikan persoalan utang dan aset catatan serius. Salah satunya adalah proses penyajian utang pemerintah kota yang masih belum rapi. Serta diminta tetap merapikan data wajib pajak bumi dan bangunan (PBB). "Untuk proses validasi utang masih belum rapi. Seperti verifikasi kepada siapa utang dibayarkan dan besarnya berapa banyak masih belum jelas," beber Kepala Perwakilan BPK Kaltim Adi Sudibyo.

Tim audit BPK menginginkan agar Pemkot Samarinda bisa menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan transparan. Artinya, semua laporan yang diberikan bisa dipahami baik itu pengeluaran maupun pendapatan. Opini WTP tetap diberikan kepada Pemkot karena semua kebutuhan audit bisa dipenuhi. Tetapi ditegaskan Adi, nilai anggaran wajib dipublikasikan. Sebab hal ini menjadi langkah mewujudkan transparansi pemerintahan. Sehingga apapun mengenai pengeluaran yang bersumber dari APBD harus diketahui publik.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Samarinda masih belum memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 karena belum sepenuhnya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun pada tahun anggaran 2015 Kota Samarinda berhasil memperoleh Opini WTP.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi, pilihan akuntansi, dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006 Indriasari dan Nahartyo, 2008). Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sistem pengendalian intern akuntansi. Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah bahwa sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian juga dilakukan oleh Prestisia (2014) menemukan bahwa kapasitas intelektual sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia

dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Prestisia, 2014).

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan. Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, multiprocessing. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Selain keterandalan hasil operasi dan kemampuan untuk mengurangi human error, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi yang bernama “pemerintah daerah”, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi mesti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Zuliarti, 2012).

Menurut Wansyah (2012) dan Prestisia (2014) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kajian tersebut maka didapat hipotesis:

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Sistem Pengendalian Intern Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah adalah:

Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah.

Keandalan pelaporan keuangan.

Pengamanan aset negara.

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka pengendalian intern akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Zuliarti, 2012).

Menurut Prestisia (2014) sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Menurut Wansyah (2012) Kegiatan pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kajian tersebut maka didapat hipotesis:

H3: Sistem Pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Metode

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia diukur dengan indikator:

Pengetahuan (knowledge) adalah ilmu atau informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu) dengan 5 butir pertanyaan.

Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal dengan 7 butir pertanyaan.

Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai didalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan dengan 3 butir pertanyaan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Pemanfaatan teknologi informasi (PTI) adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Jurnali dan Supomo, 2002) dalam Zuliarti (2012). Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000 dalam Arfianti 2011). Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya penggunaan komputer dan software secara optimal, aplikasi software yang digunakan, proses akuntansi secara komputerisasi, laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi dan perawatan perangkat secara baik. Variabel Pemanfaatan teknologi Informasi diukur dengan indikator:

Perangkat; merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak, keras dan sistem jaringan dengan 3 butir pertanyaan.

Pengelolaan Data Keuangan; merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh dengan 3 butir pertanyaan.

Perawatan; merupakan indikator untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan dengan 2 butir pertanyaan.

Sistem Pengendalian Intern Akuntansi (X3)

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah bahwa sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Variabel Sistem Pengendalian Intern Akuntansi diukur dengan indikator:

Lingkungan Pengendalian, menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur dengan 6 butir pertanyaan.

Penaksiran Resiko adalah identifikasi dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola dengan 2 butir pertanyaan.

Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan 7 butir pertanyaan.

Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan 3 butir pertanyaan.

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu dengan 3 butir pertanyaan.

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Laporan keuangan berkualitas adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam

pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, serta dapat diandalkan. Laporan keuangan yang berkualitas akan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan indikator:

Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur yaitu manfaat umpan balik (feedback value), manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu (timeliness), lengkap dengan 5 butir pertanyaan.

Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi (verifiability), netralitas dengan 5 butir pertanyaan.

Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya dengan 3 butir pertanyaan.

Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna dengan 3 butir pertanyaan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 105 orang pegawai bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Samarinda. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang pegawai dari setiap SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), kepala bagian keuangan/accounting, dan bendahara. Penentuan responden dengan jumlah 105 untuk 35 SKPD.

Alat Analisis

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47).

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah di dalam model regresi tersebut terdapat suatu penyimpangan, sehingga perlu diadakan pemeriksaan dengan menggunakan pengujian multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Pada Penelitian ini, uji autokorelasi tidak digunakan karena bukan termasuk penelitian time series.

Uji Multikolinieritas

Uji ini multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen

dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016:154).

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dimana analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi berganda yang digunakan dapat dirumuskan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97).

Uji F

Uji F adalah uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear. Jika Uji F tidak signifikan, maka tidak disarankan untuk melakukan uji t atau uji parsial. Uji F dilakukan dengan menggunakan tabel ANOVA yang bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui hubungan antara semua variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase variasi dalam dependen variabel yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam independen variabel.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan Sumber Daya Manusia yang Kompeten didukung dengan pendidikan akuntansi diharapkan mampu menerapkan dan memahami logika akuntansi dengan baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berpengaruhnya kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, baik dalam tingkat individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka kualitas laporan keuangan semakin baik.

Berdasarkan data dari jawaban responden rata-rata pendidikan pegawai pengelola keuangan adalah lulusan S1, maka sudah dianggap cukup memadai untuk menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan dengan bekal ilmu dan keahlian yang dimiliki.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prestisia (2014) yang menemukan bahwa kapasitas intelektual sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Indriasari dan Nahartyo (2008) dan Zuliarti (2012) juga menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel pemanfaatan teknologi dilihat dari penggunaan komputer dan jaringan internet. Berdasarkan data jawaban responden, rata-rata responden menjawab sering menggunakan komputer dalam melaksanakan tugasnya dan kadang-kadang memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung dalam pengiriman informasi. Dengan penggunaan komputer dan memanfaatkan jaringan internet maka penyajian laporan keuangan dapat tepat waktu yang merupakan indikator kualitas laporan keuangan, selain itu penyebaran informasi menjadi lebih mudah. Berdasarkan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda,

ini dibuktikan dengan perhitungan regresi dengan tingkat signifikansi 0,046. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Zuliarti (2012) dan Prestisia (2014) dengan hasil, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator untuk mengukur variabel ini didasarkan pada PP No. 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Berdasarkan data jawaban responden, rata-rata responden menjawab setuju untuk setiap indikator penilaian, yang artinya dari kelima unsur pengendalian tersebut sudah dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Samarinda. Dengan penerapan sistem pengendalian intern akuntansi, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan serta bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material yang merupakan indikator kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) dan Zuliarti (2012) yang menemukan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Prestisia (2014) juga menemukan bahwa dengan sistem pengendalian intern pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Artinya bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Artinya bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Sistem Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Artinya bahwa, semakin baik pelaksanaan unsur sistem pengendalian intern akuntansi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Daftar Pustaka

- Amirullah. 2014. BPK Apresiasi Laporan Keuangan Pemkot Samarinda. <http://www.antarakaltim.com>, diakses tanggal 24 Juli 2016.
- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ariesta, Fadila. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat). Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Padang.

- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Humas. 2014. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2013 dan 2012. <http://samarinda.bpk.go.id>, diakses tanggal 25 Juli 2016.
- Humas. 2015. Jaang Sampaikan LKPD Tahun 2014. <http://samarindakota.go.id>, diakses tanggal 25 Juli 2016.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Akuntansi*.
- Nagari, Hilda Berliana. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Dinas Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014). Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Novalia, Irma. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas SKPD Kota Surakarta). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 1 tentang karakteristik Pegawai Negeri Sipil.
- Prestisia, Firna Dwi. 2014. Pengaruh Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Skripsi. Universitas Jember. Jember.
- Prokal. 2016. Banyak Utang, Pemkot Samarinda dapat WTP, Kok Bisa Ya (Pekot Samarinda Belum Transparan). <http://radarkaltim.prokal.com>, diakses tanggal 25 Juli 2016.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Rosalin, Faristina. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*, Andi. Yogyakarta.
- Wansyah, Hendra dan Darwanis. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Aceh.
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi. Universitas Muria Kudus. Kudus.